Jurnal AS-SAID
2023, Vol.3, No.2, Halaman 54-58 E-ISSN: 2774-4175

EVALUASI PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM KINERJA FINANSIAL ORGANISASI NIRLABA
Penelitian dilakukan di Yayasan Hidayatullah Batam

Fitri Miswati
Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Abdullah Said Batam, Indonesia
miswatifitri815@gmail.com

Samsudirman
Mahasiswa Akuntani Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Abdullah Said Batam, Indonesia

ABSTRAK

Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pengelolaan keuangan yayasan YPI Darussalam Cerme dengan paradigma *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YPI Darussalam telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, namun penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ISAK 35. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika organisasi nirlaba menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, maka organisasi nirlaba dapat berkembang dengan pesat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : *Tata Kelola yang Baik, ISAK 35, dan Organisasi Nirlaba*

PENDAHULUAN

Manajemen organisasi adalah hal yang sangat krusial bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Saat ini, bukan hanya praktisi pemerintahan dan korporasi yang mengadopsi prinsip tata kelola yang baik, tetapi organisasi nirlaba juga harus berubah menjadi entitas yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Menerapkan prinsip *Good governance* sangat penting bagi organisasi nirlaba karena dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola organisasi. Diperlukan perubahan paradigma dalam berpikir dan bertindak bagi seluruh elemen sektor publik agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif yang mendukung partisipasi masyarakat, supremasi hukum dalam urusan keuangan, serta peningkatan kinerja organisasi. Tata pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis adalah cara penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan cita-cita masyarakat yang madani. *Good governance* merujuk pada pemerintahan yang menyusun dan menggunakan asas-asas profesionalisme, pertanggungjawaban, keterbukaan, pelayanan unggul, demokrasi, keefektifan, keefisienan, supremasi hukum, dan diterima oleh seluruh rakyat (Listiyowati, 2021).

Umumnya, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab suatu organisasi dalam membuat perhitungan yang akurat dan mencatatnya dengan benar mengenai transaksi keuangan dan kondisi organisasi, kemudian disampaikan dalam laporan tahunan. Berdasarkan penjelasan itu, diperlukan standar yang telah ditetapkan untuk menyampaikan laporan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas yang tidak berorientasi laba diatur dalam ISAK No.35 mengenai pelaporan entitas nonlaba. Ada lima jenis pelaporan keuangan yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba agar dapat membantu akuntabilitas, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Warastuti et al., 2022).

Yayasan pendidikan adalah organisasi non-profit di Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu yang fokus pada pendidikan formal dan non-formal. Secara keseluruhan, tujuan organisasi lembaga pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni untuk mencari keuntungan (usaha) dan yang lainnya adalah tujuan tanpa keuntungan, baik lembaga pendidikan swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah. Yayasan adalah salah satu contoh organisasi nirlaba. Sekarang, organisasi sektor publik harus bisa mengurangi biaya ekonomi dan sosial yang dikeluarkan untuk aktivitas yang dilakukan. Penelitian mengenai Penerapan Tata Kelola Ngo yang Baik pada LSM Lokal menemukan hasil yang beragam terkait implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penyempurnaan dalam penerapan *Good governance* agar dapat menjadi dasar dalam kegiatan organisasi. Hasil penelitian oleh Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H. (2020) mengenai Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba juga menunjukkan temuan yang perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan penerapan *Good governance* yang diinginkan (Turangan et al., 2022).

Konsep *Good Governance*

Menurut World Bank, *Good Governance* adalah pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sesuai dengan demokrasi, pasar efisien, menghindari kesalahan dalam alokasi investasi, mencegah korupsi politik dan administratif, melaksanakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendukung aktivitas usaha (Afridayani et al., 2022).

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip-Prinsip *Good governance* meliputi : *Participation* (Partisipasi), *Rule of law* (Peraturan Hukum), *Transparancy* (Transparansi), *Responsiveness*, *Consensus orientation*, *Equity* (Keadilan/Kesetaraan), *Effectiveness and efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Strategic vision* (Visi Strategis) (Amelia & Bharata, 2022).

a. Prinsip Transparansi: Prinsip transparansi menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasilnya.
b. Prinsip Akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas publik menunjukkan seberapa besar kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan standar atau nilai-nilai spesifik.
c. Prinsip Supremasi Hukum: Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ada banyak poin penting yang dapat dicapai untuk mencapai supremasi hukum, tergantung pada bagaimana hukum diterapkan.
d. Ide-ide untuk Visi Strategis Sebuah organisasi yang dianggap memiliki pemerintahan yang baik harus memiliki visi atau wawasan ke depan, tidak hanya secara teknis organisasional, tetapi juga pemimpin yang visioner dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Cita-cita organisasi akan terlihat melalui visinya.
e. Ideal Profesionalisme Berdasarkan visi dan misi yang melandasi organisasi, kegiatan operasional dan program dapat dilakukan dengan lebih efektif jika visi dan misi kuat. Dalam mewujudkan good governance, sikap profesional harus diterapkan dan standar harus dipatuhi. Seseorang dianggap profesional jika mereka memiliki kemampuan untuk melakukan tugas tertentu.
f. Prinsip Responsifitas: Prinsip responsifitas mengatakan bahwa lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

g. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Organisasi yang memiliki manajemen yang baik selalu melakukan perencanaan dan perhitungan yang baik untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi kata-kata dalam konteks alami dengan menggunakan metode alamiah. Survei lapangan dan wawancara dengan narasumber adalah metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Lalu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain dan setelahnya. Informasi tambahan untuk penelitian berasal dari dokumen keuangan dan digital yang terkait dengan Yayasan (Wachid & Miswati, 2022).

Fokus riset ini mencakup Prinsip-prinsip *Good governance* seperti: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Supremasi hukum, serta dampak dari prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan kinerja organisasi, (4) Responsibilitas, (5) Profesionalisme, dan (6) Efisiensi dan Efektivitas. Strategi snowball sampling digunakan dalam penelitian ini. Snowball sampling, di mana dalam penelitian kualitatif ini, ada kemungkinan fenomena yang sedang diteliti akan berkembang lebih luas dan subjek penelitian akan bertambah karena kebutuhan informasi yang masih belum terpenuhi. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti mencakup observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan review literatur. Pemeriksaan validitas data ini dilakukan menggunakan tiga metode, yaitu pengecekan kepercayaan data, transferabilitas, dan reliabilitas (Wachid, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih orang yang memiliki pengetahuan yang diperlukan sebagai informan kunci. Peneliti memilih para pengurus yang terlibat dalam tata kelola dan keuangan yayasan, seperti ketua umum, sekretaris, dan bendahara yang merupakan bagian dari yayasan tersebut, sebagai informan dalam penelitian. Setelah mengumpulkan berbagai data, peneliti selanjutnya melakukan analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miswati & Rinjani, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hal tersebut berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dalam tata kelola Yayasan Hidayatullah Batam teridentifikasi semua prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, prinsip-prinsip *good governance* seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, visi strategis, profesionalirme, responsibilitas, efisiensi dan efektivitas apabila diterapkan pada organisasi non profit akan memberikan dampak positif yang mendorong kepada kemajuan organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan organisasi di lingkungan masyarakat. ISAK 35 belum diterapkan Yayasan dalam menyajikan laporan keuangannya. Namun demikian, Yayasan membuat satu bentuk laporan keuangan bulanan serta laporan tahunan yang sederhana. Secara umum dapat dikatakan tujuan penyusunan laporan pada masjid telah tercapai, yakni menjelaskan pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir, meskipun informasi-informasi yang disajikan belum mendetail.

Transparansi Diimplementasikan

Prinsip transparansi yayasan ini terlihat melalui cara visi, misi, kebijakan, dan informasi yayasan disampaikan. Dalam hal penyampaian visi dan misi yayasan, semua karyawan sudah mengetahuinya dan dilakukan dengan baik. Karyawan diberitahu tentang kebijakan yayasan melalui lisan maupun tulisan, dan harus mengikuti kebijakan tersebut. Perusahaan mengadakan rapat bulanan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut kepada seluruh karyawan. Laporan keuangan yayasan disampaikan secara transparan dalam rapat dengan pengurus, pengawas, dan kepala unit sekolah Hidayatullah, namun tidak dipublikasikan secara umum di website, tetapi hanya kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Menurut narasumber, setiap unit sekolah memiliki website yang sudah dikelola oleh masing-masingnya tetapi hanya beberapa yang aktif.

Penerapan Konsep Akuntabilitas

Dalam hal akuntabilitas, setiap karyawan dalam yayasan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepala sekolah dan bendahara setiap unit sekolah harus bertanggung jawab secara finansial dengan menyampaikan laporan keuangan ke Yayasan setiap semester. Kemudian, setiap unit sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban keuangannya kepada Kantor Dinas Pendidikan Batam dalam hal akuntabilitas kepada pemerintah. Dalam penyiapan laporan keuangan, digunakan format atau standar yang telah ditetapkan oleh yayasan tersebut. Dalam hal ini, belum memenuhi standar umum yaitu ISAK 35. Namun narasumber menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam laporannya karena telah berjalan sesuai rencana yang telah disusun.

Penerapan Prinsip Supremasi Hukum

Sejak tahun 2015, Yayasan Hidayatullah Batam telah memiliki legalitas hukum. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Yayasan Hidayatullah Batam telah diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya sehingga berhasil mengembangkan dan mendirikan 10 sekolah dan beberapa unit usaha yang bekerjasama dengan pengusaha. Setiap pekerja di yayasan harus mematuhi peraturan, dan setiap siswa di sekolah harus mematuhi peraturan tersebut. Mereka yang melakukan pelanggaran akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan sekolah.

Implementasi Prinsip Profesionalisme

Yayasan menjalankan aktivitas secara profesional dan mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua bagian yayasan harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Yayasan Hidayatullah Batam. Menurut penilaian yayasan, semua karyawan telah mengimplementasikan SOP yang berlaku.

Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab

Perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosial dan etika dengan mematuhi peraturan dan lingkungan. Semua pegawai Yayasan Hidayatullah Batam telah patuh terhadap peraturan yang berlaku di Yayasan tersebut. Yayasan menyelenggarakan kegiatan Qurban untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, dimana daging Qurban akan didistribusikan kepada semua murid sekolah dan karyawan. Ini menandakan perhatian Yayasan terhadap semua karyawan dan murid yang berada di sekolah Yayasan.

Menjalankan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Program di yayasan dibuat dengan mempertimbangkan visi dan misi tersebut untuk sesuai dengan aspirasi dan target organisasi. Sifat ini berhubungan dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni prinsip efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya tujuan dan maksud,

program akan lebih terfokus sehingga dalam pelaksanaannya dapat direncanakan dengan matang agar berjalan secara efisien dan efektif.

SIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan: evaluasi, dan pembahasan, dapat dinyatakan bahwa Yayasan Hidayatullah Batam berhasil memperkuat organisasi pendidikan mereka sehingga mendapatkan dukungan besar dari masyarakat karena menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

REFERENSI

Afridayani, A., Pratiwi, A. P., Purwatiningsih, P., Ahnaf, T. Q., & Laelani, A. (2022). Implementasi ISAK 35 Pada Pelaporan Keuangan SDIT Permata Gemilang. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, *4*(1), 62–67. https://doi.org/10.31092/kuat.v4i1.1498

Amelia, S., & Bharata, R. W. (2022). Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia). *Akuntansiku*, *1*(4), 288–298. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.314

Listiyowati, L. (2021). Kajian Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada Pondok Pesantren. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, *13*(2), 168–182. https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.146

Miswati, F., & Rinjani, M. (2022). Analysis of Implementation of Psak 45 Conserning the Preparation and Presentation of Financial Statement of Non Profit Organizations At State Sma 17 Batam. *Jurnal AS-SAID*, *2022*(1), 35–46.

Turangan, G. J., Putong, I. H., & Tangon, J. N. (2022). Implementasi ISAK No . 35 Atas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus pada GMIM Bethesda Tatelu). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2), 3753–3762.

Wachid, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bari'Ussalam Batam. *Jurnal AS-SAID*, *2*(1), 66–73.

Wachid, A., & Miswati, F. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan BMT Nurul Islam Batam Berdasarkan Permenkop Nomor: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tahun 2017-2019. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, *1*(1), 7–21. https://doi.org/10.55438/jqim.v1i1.3

Warastuti, Y., Susilawati, C., Butar-Butar, S., & Murniati, M. P. (2022). Studi Kualitatif Persepsi Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Isak 35. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, *5*(1), 88–108. https://doi.org/10.24167/jemap.v5i1.4067